

KURIKULUM MERDEKA SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KRISIS BELAJAR

AN INDEPENDENT CURRICULUM AS A SOLUTION TO THE LEARNING CRISIS

Syafira Nundri Antari¹⁾, Trapsilo Prihandono²⁾

^{1,2}Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Jember
¹syafira@unars.ac.id

ABSTRAK

Salah satu amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) adalah bahwa Pemerintah Indonesia harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandemi COVID-19 semakin memperparah krisis pembelajaran yang sudah ada di Indonesia. Selama 2 tahun pandemi, terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang signifikan dalam hal kompetensi literasi dan numerasi siswa. Indonesia tidak hanya berjuang menghadapi *learning loss* dan *learning gap* akibat pandemi, tetapi juga menghadapi risiko melebarinya kesenjangan pembelajaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan penelitian yang mengkaji teks, buku atau materi dalam buku yang berisikan informasi untuk dikaji. Untuk mengatasi krisis belajar di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti penyederhanaan kurikulum, penyempurnaan kurikulum baru, dan memberikan kebebasan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada tiga hal utama yang menjadi dasar strategi implementasi Kurikulum Merdeka: 1. Kurikulum Merdeka adalah pilihan, 2. Implementasi kurikulum adalah sebuah proses pembelajaran, 3. Dukungan harus diberikan kepada satuan pendidikan dan pendidik sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi situasi maupun waktu.

Kata Kunci: kurikulum merdeka; solusi; krisis belajar

ABSTRACT

One of the mandates in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) is that the Indonesian Government must make the nation's life more intelligent. To make this happen, efforts are being made to improve the quality of education and its equality throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The COVID-19 pandemic has further exacerbated the learning crisis that already exists in Indonesia. During the 2 years of the pandemic, there has been a significant increase in learning loss in terms of students' literacy and numeracy competencies. Indonesia is not only struggling with learning loss and learning gaps due to the pandemic, but also

faces the risk of widening learning gaps. The research uses a qualitative method with a content analysis approach. Content analysis is research that examines texts, books or material in books that contain information to be studied. To overcome the learning crisis in Indonesia, the government has implemented several policies, such as simplifying the curriculum, refining the new curriculum, and giving each educational unit the freedom to use the curriculum that best suits their needs. There are three main things that form the basis of the Merdeka Curriculum implementation strategy: 1. The Merdeka Curriculum is a choice, 2. Curriculum implementation is a learning process, 3. Support must be given to educational units and educators according to needs, both in terms of situation and time.

Keywords: independent curriculum; solutio;, learning crisis

PENDAHULUAN

Salah satu amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) adalah bahwa Pemerintah Indonesia harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen meningkatkan anggaran di bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru, standarisasi dan akreditasi sekolah, serta kebijakan lainnya. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas guru-guru (Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, 2017). Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran masing-masing, seperti dukungan standarisasi dari pemerintah pusat dan dukungan anggaran serta fasilitas dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (Sagala, 2011:83).

Namun, survei dan penelitian menunjukkan bahwa berbagai indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia, terutama kualitas hasil belajar siswa, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data dari tes PISA selama periode 2000 hingga 2018 menunjukkan stagnasi dan bahkan penurunan prestasi peserta didik

Indonesia. Pada bidang matematika, misalnya, Indonesia menempati peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil serupa juga terlihat dalam tes sains dan membaca. Selisih nilai matematika antara peserta didik Indonesia dan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000, namun hanya berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia.

Survei non-akademik seperti pendidikan sikap dan perilaku juga menunjukkan perlunya perbaikan. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan yang rendah karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri dalam bidang akademis (OECD 2019).

Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menunjukkan rendahnya kompetensi dasar dan ketimpangan yang tinggi. Meskipun Indonesia berhasil meningkatkan akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, survei nasional dan internasional serta tren skor Ujian Nasional mengindikasikan bahwa dalam 15-20 tahun terakhir, hasil belajar tidak mengalami peningkatan. Ketertinggalan pembelajaran terlihat dari kesulitan peserta didik memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, atau kompleksitas permasalahan karena tidak menguasai pembelajaran di setiap jenjang. Ketimpangan ini disebabkan oleh kurangnya akses peserta didik terhadap perangkat digital, guru yang adaptif dan berkemampuan IT yang memadai, kondisi finansial, dan dukungan orang tua yang aktif (The SMERU Research Institute, 2020).

Pandemi COVID-19 semakin memperparah krisis pembelajaran yang sudah ada di Indonesia. Selama 2 tahun pandemi, terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang signifikan dalam hal kompetensi literasi dan numerasi siswa. Indonesia tidak hanya berjuang menghadapi *learning loss* dan *learning gap* akibat pandemi, tetapi juga menghadapi risiko melebarnya kesenjangan pembelajaran, terutama pada siswa dari keluarga dengan latar

belakang sosial ekonomi rendah yang lebih berisiko tidak terdaftar atau tidak berpartisipasi dalam proses pembelajaran (Studi INOVASI dan Puslitjak, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan penelitian yang mengkaji teks, buku atau materi dalam buku yang berisikan informasi untuk dikaji. Menjadikan data teks ilmiah sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah untuk mendapatkan suatu hipotesa atau konsep yang objektif. Sebagai sebuah teknik penelitian, content analysis yang digunakan dalam penelitian ini berusaha melaksanakan prosedur khusus untuk memperoleh data ilmiah yang relevan dengan maksud memberikan pengetahuan baru, membuka wawasan baru, serta menghadirkan fakta sesuai bidang yang dijadikan kajian. Sumber data yang digunakan, yaitu beberapa literature yang relevan dengan tema dalam penelitian ini, yaitu mengenai keterkaitan kurikulum merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu melihat dan menganalisis dokumen yang dijadikan objek kajian penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi dimana data yang diperoleh diklasifikasi setelah adanya penelaahan terhadap berbagai *literature* terkait. Setelah itu proses sistematisasi, verifikasi data dan penafsiran dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang konseptual tentang objek yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena *Learning loss*

Fenomena *learning loss* akibat pandemi COVID-19 tahun 2019 bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga oleh hampir seluruh negara di dunia yang terpaksa menutup sekolah karena pandemi (Engzell, Frey, dan Verghan, 2021; Jonson et al., 2014). Untuk mengatasi ketertinggalan ini, setiap negara membuat kebijakan sebagai respons terhadap krisis COVID-19. Studi lebih lanjut menyoroti dampak-dampak signifikan dari perubahan radikal dalam proses pembelajaran selama pandemi. Temuan dari studi tersebut menunjukkan

terjadinya *learning loss*, di mana siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menyelesaikan pembelajaran di jenjang kelas, serta mengalami efek kumulatif karena tidak menguasai pembelajaran di setiap jenjang. Studi oleh Indrawati, Prihadi, dan Siantoro (2020) di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pada awal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hanya 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah. Kondisi ini diperburuk dengan kualitas pembelajaran yang diterima siswa selama PJJ yang tidak setara dengan pembelajaran sebelum pandemi. Banyak siswa hanya menerima instruksi, umpan balik, dan interaksi yang terbatas dari guru mereka (Indrawati, Prihadi, dan Siantoro, 2020).

Pada akhir Agustus, saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mitigasi *learning loss* akibat pandemi dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Selain itu, pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum, serta modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020, yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau menyederhanakan kurikulum 2013 secara mandiri.

Kurikulum darurat ini pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional, dengan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat berikutnya. Penggunaan kurikulum darurat secara signifikan mampu mengurangi indikasi *learning loss* selama pandemi, baik dalam capaian literasi maupun numerasi (sumber: Kemendikbud 2021).

Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbudristek memberikan opsi penggunaan kurikulum: Kurikulum K-13 secara utuh, Kurikulum darurat, dan

Kurikulum Merdeka (Paparan Kemdikbudristek, 2021). Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan kurikulum yang: (1) Sederhana, mudah dipahami, dan diimplementasikan; (2) Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; (3) Fleksibel; (4) Selaras; (5) Kolaboratif; dan (6) Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik (Kajian Akademik Pemulihan Pembelajaran).

Landasan utama perancangan Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga menjadi dasar bagi kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Permendikbud tersebut mengindikasikan bahwa Merdeka Belajar mendorong perubahan paradigma, termasuk dalam hal kurikulum dan pembelajaran. Perubahan ini bertujuan menguatkan kemerdekaan guru sebagai pengendali utama dalam proses pembelajaran, mengurangi kontrol standar yang terlalu ketat, dan menguatkan hak serta kemampuan peserta didik untuk menentukan proses belajarnya sendiri.

Melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, pemerintah telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima Belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar secara daring pada Jumat, 11 Februari 2022, untuk mengatasi krisis pembelajaran. Beberapa keunggulan Kurikulum Merdeka antara lain lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai fase mereka. Selain itu, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Penerapan Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif, dengan pembelajaran melalui proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, seperti isu lingkungan dan kesehatan, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil

Pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dapat memilih tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023: pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan; kedua, menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan; ketiga, menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

Kurikulum Merdeka, sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe, telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PGP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun 2022, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan oleh satuan pendidikan meskipun bukan Sekolah Penggerak, mulai dari TK-B, SD dan SDLB kelas I dan IV, SMP dan SMPLB kelas VII, SMA dan SMALB serta SMK kelas X.

B. Evaluasi Efektivitas Kurikulum Merdeka

Evaluasi efektivitas Kurikulum Merdeka memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dipertimbangkan dengan baik. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas Kurikulum Merdeka:

1. Pencapaian kompetensi merupakan inti dari evaluasi kurikulum. Indikator keberhasilan mencakup seberapa baik siswa dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode penilaian, termasuk ujian, tugas proyek, dan penilaian portofolio, yang masing-masing dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran.
2. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan memahami teks, serta kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dan menerapkan pemikiran kritis dalam konteks berbagai situasi.

3. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas Kurikulum Merdeka. Indikator keberhasilan mencakup tingkat partisipasi siswa dalam diskusi kelas, keaktifan mereka dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan sesama siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran.
4. Salah satu tujuan Kurikulum Merdeka adalah mengembangkan motivasi intrinsik dan kemandirian belajar siswa. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan motivasi siswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran, kepercayaan diri mereka dalam mengatasi kesulitan, dan kemampuan mereka untuk mengatur waktu dan mengelola diri sendiri dalam proses belajar.
5. Evaluasi efektivitas Kurikulum Merdeka juga harus memperhatikan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang terjadi di dalam kelas. Indikator keberhasilan mencakup kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan relevan, serta kemampuan mereka dalam menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dan interaktif.
6. Pendapat dan tanggapan dari berbagai pihak terkait, termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat umum, juga merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas Kurikulum Merdeka. *Feedback* dari stakeholder dapat memberikan informasi berharga tentang bagaimana kurikulum ini diterima dan diimplementasikan di berbagai tingkatan, serta membantu dalam identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator keberhasilan ini secara menyeluruh, evaluasi terhadap efektivitas Kurikulum Merdeka dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencapaian tujuan kurikulum dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa serta perkembangan mereka secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi krisis belajar di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti penyederhanaan kurikulum, penyempurnaan

kurikulum baru, dan memberikan kebebasan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada tiga hal utama yang menjadi dasar strategi implementasi Kurikulum Merdeka:

1. Kurikulum Merdeka adalah pilihan.
2. Implementasi kurikulum adalah sebuah proses pembelajaran.
3. Dukungan harus diberikan kepada satuan pendidikan dan pendidik sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi situasi maupun waktu.

Kurikulum adalah aspek penting dalam pembelajaran dan dapat dilihat sebagai pusat bagi kebijakan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah tidak hanya sebatas dukungan teknis (seperti pelatihan pendidik dan sarana prasarana), tetapi juga penyesuaian kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

Satuan pendidikan memiliki tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka:

1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang digunakan.
2. Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan.
3. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2020). *Transformasi pendidikan dan berbagai problemnya*. <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19/transformasi-pendidikan-dan-berbagai-problemnya> (diakses Juni 2024)
- Ahmad, S. (2014) *Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah*. Jurnal Pencerahan. Vol. 8. No. 2
- Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). *Belajar dari rumah: potret ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19*. Catatan Penelitian SMERU No. 1/2020
- Dewantara, Ki Hadjar. (2009). *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika.

- Djaelani, A.R., Pratikno, H.H., & Setiawan, T. (2019). *Implementasi kurikulum dan permasalahannya* (Studi kasus di SMK Ganesa Kabupaten Demak
- Kementerian Keuangan. (2021). *Usaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui mandatory spending anggaran pendidikan*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/usaha-peningkatkan-kualitas-pendidikanmelaluimandatory-spending-anggaranpendidikan-> (diakses Juni 2024)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Analisis survei cepat pembelajaran dari rumah dalam masa pencegahan COVID-19*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, Juni 2). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020-2024*.
- Pratiwi, Solihin., Rahmah, U. (2019). *Regulasi guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran*. Pusat Penelitian Kebijakan.